PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KADEK RIHENDRA DANTES**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **833595**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.130.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/90.46 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/200 m2 di KAB / KOTA BULELENG, WARISAN Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 371.000.000**

1. MOTOR, --- SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	97.598.459
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	206.942.565
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	3.805.541.024
III.	HUTANG	Rp.	----
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.805.541.024

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.